

**SEKAPUR SIRIH**  
**BAHASA DAN PETA BAHASA DI INDONESIA**  
**EDISI KEENAM**

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Selain itu, salah satu potensi besar bangsa Indonesia yang patut disyukuri adalah kebinekaan bahasa yang kita miliki. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki khazanah bahasa daerah terbanyak di dunia. Khazanah tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa yang menyimpan tata nilai, etika, dan moral yang ekspresinya dapat kita lihat dalam berbagai bentuk kebahasaan, seperti pilihan kosakata dalam tuturan, ungkapan tradisional, pantun, cerita rakyat, sejarah setempat, mitos, dan legenda.

*Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia* Edisi Keenam ini, baik berupa buku peta bahasa maupun peta bahasa daring, mendeskripsikan informasi bahasa-bahasa di Indonesia dan pemetaannya sangat diperlukan sebagai informasi dasar untuk merancang berbagai kebijakan dan kegiatan untuk pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa. Dalam konteks kebinekaan sebagai modal dasar serta perekat persatuan bangsa Indonesia, peta bahasa dapat membantu menggambarkan persebaran bahasa dari kebinekatunggalikaan budaya yang kita miliki. Dengan demikian, peta bahasa ini menjadi salah satu sumbangan berarti dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, yang secara gamblang menyatakan bahwa “(1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan (2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

*Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia* Edisi Keenam ini merupakan edisi terakhir kegiatan pemetaan bahasa yang dilakukan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data yang digunakan untuk membuat peta bahasa, berasal dari 2.560 titik pengamatan yang merupakan percontohan dari semua provinsi di seluruh Indonesia. Jadi, berdasarkan analisis yang dilakukan, total bahasa daerah yang terpetakan hingga Oktober 2019 berjumlah 718 bahasa. Adapun pada Edisi Kelima, yang diluncurkan 28 Oktober 2018, baru terpetakan 668 bahasa. Sehubungan dengan hal itu, di Edisi Keenam ini dilakukan revisi peta bahasa di beberapa provinsi. Di samping itu, juga dilakukan (1) penyempurnaan narasi terhadap beberapa bahasa karena adanya penambahan jumlah bahasa yang ditemukan, (2) perubahan nama bahasa dengan berbagai pertimbangan, dan (3) penyesuaian penulisan lokasi tempat bahasa itu dituturkan akibat adanya pemekaran wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Sebagai edisi terakhir, *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia* Edisi Keenam ini merupakan puncak dari semua kerja keras pemetaan bahasa di Indonesia yang telah dilakukan dengan instrumen dan metode yang sama. Akan tetapi, seperti halnya dinamika bahasa yang selalu mengalami perubahan, pemetaan bahasa juga akan mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Apa yang sebelumnya

disebut bahasa, pada suatu saat dapat saja berkedudukan sebagai dialek atau sebaliknya. Keekerabatan dan vitalitas bahasa pasti akan mewarnai pemetaan bahasa selanjutnya. Oleh sebab itu, pemetaan bahasa tetap terus dilakukan pada masa mendatang.

Penyelesaian pemetaan bahasa edisi keenam ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Dr. Multamia R.M.T. Lauder, Mse., D.E.A. (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Kisyani-Laksono, M.Hum. (Universitas Negeri Surabaya), dan Prof. Dr. Nadra, M.S. (Universitas Andalas), serta Ir. Ferry Feirizal, M.Kom. (Politeknik Negeri Bandung) yang berperan aktif sebagai narasumber dalam penyempurnaan peta bahasa edisi keenam ini. Kami juga sangat berterima kasih atas kesigapan serta ketekunan rekan-rekan dari Badan Informasi Geospasial, khususnya M. Fifik Syafudin, S.T., M.Sc. dan Harry Ferdiansyah, S.T., M.Sc., yang membantu kami mewujudkan peta bahasa di seluruh wilayah Indonesia.

Kami juga berterima kasih kepada Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S. (Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan) dan Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd. (Kepala Pusat Pembinaan) yang dengan penuh semangat mendampingi proses perevisian dan penerbitan peta bahasa ini. Di samping itu, ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Dr. Ganjar Harimansyah, Deni Setiawan, S.S., dan Drs. Suladi, M.Pd. yang secara aktif mengoordinasi dan memantau secara ketat perevisian peta bahasa ini. Demikian pula, kami sampaikan rasa bangga dan ucapan terima kasih kepada Dra. Wati Kurniawati, M.Hum., Drs. Buha Aritonang, Dra. Mukhamdanah, M.Hum., Inayatushalihah, M.Hum., Purwaningsih, M.Hum., Retno Handayani, M.Hum., Miranti Sudarmaji, M.Pd., Itmam Jalbi, S.Ag., Mardi Nugroho, S.S., Deliar Noer, M.Pd., Satwiko Budiono, S.Hum., Rohim, M.Hum., Winci Firdaus, M.Hum., Anita Astriawati Ningrum, M.Hum., Dwi Agus Erinita, M.Hum., Devi Luthfiah, S.Pd., Deliar Noer Rahmahsani, M.Pd., Wawan Prihartono, M.Hum., beserta Tim Pemetaan Bahasa dari Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia yang telah berperan aktif dalam mewujudkan hasil penelitian ini.

Semoga *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia* ini bermanfaat sebagai bahan informasi dasar kebahasaan yang mutlak diperlukan untuk memperluas wawasan serta untuk kepentingan berbagai penelitian bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Peta Bahasa merupakan potret kekayaan budaya bangsa yang seyogianya segera ditindaklanjuti dengan penelusuran keekerabatan bahasa dan vitalitas bahasa. Dengan demikian, program pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa akan dapat terlaksana secara tepat dan terarah. Saya mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna penyempurnaan dan perbaikan peta bahasa ini pada masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Oktober 2019

**Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.**  
Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

## IHWAL PEMETAAN BAHASA DI INDONESIA

### 1.1 Alu-Aluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bahasa daerah yang terbanyak di dunia. Khazanah kekayaan budaya bangsa tersebut tersebar dari Sabang di titik barat hingga ke Merauke di titik timur serta dari Miangas di titik utara hingga ke Rote di titik selatan. Kekayaan itu terhampar di tiga zona waktu yang setara dengan rentangan dari Britania Raya di titik barat hingga ke Yunani di titik timur.

Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Kondisi ini menumbuhkan keanekaragaman budaya serta flora dan fauna sesuai dengan situasi lingkungan alamnya. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa beragamnya kosakata bahasa daerah yang menggambarkan kondisi itu, belum termasuk aneka kosakata yang mendeskripsikan berbagai hasil olahan produk setempat yang khas dan unik.

Tidak mudah untuk memahami budaya secara serta-merta. Salah satu cara untuk memahami budaya dapat dilakukan melalui bahasa. Bahasa memiliki salah satu fungsi sebagai penyimpan tata nilai budaya termasuk etika dan moral yang tersimpan dalam berbagai bentuk kebahasaan, antara lain dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, sejarah setempat, mitos, legenda, tradisi lisan, dan ungkapan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan penjaga budaya; apabila sebuah bahasa punah, pada umumnya budayanya pun akan ikut punah.

Sehubungan dengan hal itu, keanekaragaman bahasa daerah harus dikembangkan dan dilindungi karena merupakan kekayaan budaya bangsa, bahkan kekayaan budaya seluruh umat manusia di dunia. Kewajiban negara untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap kebinekaan bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, yang secara gamblang menyatakan bahwa (1) negara **memajukan kebudayaan nasional Indonesia** di tengah peradaban dunia dengan **menjamin kebebasan** masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan (2) negara **menghormati** dan **memelihara** bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan adanya klausul yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut, semua bahasa daerah yang berada di Indonesia adalah kekayaan budaya nasional yang perlu dilindungi.

Oleh karena itu, agar pengembangan dan perlindungan terhadap bahasa daerah dapat dilaksanakan diperlukan informasi yang komprehensif mengenai eksistensi bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Selain itu, informasi mengenai bahasa daerah tidak akan pernah lengkap jika melupakan informasi mengenai bahasa-bahasa di daerah pencilan dan juga bahasa-bahasa suku terasing. Dengan demikian, pada saat penjaringan data perlu

mempertimbangkan faktor migrasi penduduk karena apabila penduduknya pindah maka secara otomatis bahasanya pun akan ikut berpindah.

Memang sulit untuk melacak lokasi bahasa pencilan dan suku-suku terasing karena penelitian dan kepustakaan yang berkenaan dengan suku-suku terasing sangat minim. Belum ditemukan satu penelitian pun yang mendeskripsikan lokasi suku-suku terasing di seluruh Indonesia secara lengkap dan komprehensif. Penjaringan data di lapangan dapat membantu pelacakan keberadaan mereka dengan cara meningkatkan jumlah desa sebagai titik pengamatan di tiap wilayah. Masalahnya, apabila hanya beberapa ahli bahasa saja yang berminat mengurus bahasa daerah, semua bahasa daerah yang semula tergolong bahasa yang terancam punah akan dengan cepat mengalami proses menuju ke bahasa sekarat (*moribund language*) hingga menuju ke kematian bahasa (*language death*) dalam berbagai gradasi. Oleh karena itu, pemetaan bahasa yang komprehensif dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan agar dapat melindungi dan melestarikan bahasa daerah di seluruh Indonesia.

## 1.2 Situasi Kebahasaan di Indonesia

Situasi kondisi kebahasaan di Indonesia cukup rumit. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan negara multilingual. Semua bahasa di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga kategori besar, yaitu (1) bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, (2) bahasa daerah, dan (3) bahasa asing (Alwi and Sugono, 2000, Renandya, 2000: 115). Jika diperhatikan dengan lebih jauh, distribusi bahasa di Indonesia tidak merata. Secara umum, wilayah Indonesia bagian barat memiliki jumlah penduduk yang banyak, tetapi jumlah bahasa daerahnya sedikit jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur yang jumlah penduduknya sedikit, tetapi jumlah bahasa daerahnya banyak.

Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang belum dapat dijawab dengan pasti, antara lain tanya 1) "Berapakah jumlah bahasa daerah di seluruh Indonesia?"; 2) "Bahasa daerah apa saja yang ada di Indonesia?"; lalu 3) "Bagaimanakah kekerabatan bahasa-bahasa daerah itu di seluruh Indonesia?"; kemudian 4) "Berapakah jumlah penutur dari tiap bahasa daerah itu?"; dan 5) "Bagaimana vitalitas serta pemakaian tiap bahasa daerah?" serta masih banyak lagi pertanyaan-tanyaannya. Akan tetapi, tidak seorang pun dapat menjawabnya dengan tepat, baik ahli bahasa di Indonesia maupun di dunia. Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena diperlukan data yang menyeluruh dan komprehensif mengenai semua bahasa daerah di Indonesia.

Pelacakan bahasa-bahasa di seluruh Indonesia sesungguhnya sudah lama diupayakan oleh berbagai pihak, baik oleh pribadi maupun oleh instansi, seperti yang dilakukan oleh Salzner (1960) yang berpendapat bahwa di seluruh Kepulauan Indonesia hanya terdapat 69 bahasa; kemudian Esser (1951); Alisjahbana (1954); Adinegoro (1954); Iskandar (1957); dan Hadidjaja (1961) yang sependapat bahwa di seluruh Kepulauan Indonesia terdapat lebih kurang 200 bahasa. Pada tahun 1972, Lembaga Bahasa Nasional berusaha menengahi pertentangan pendapat itu dengan cara mengirimkan kuesioner ke tiap provinsi melalui Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk diisi oleh para pejabat setempat. Hasilnya, di seluruh Kepulauan Indonesia tercatat 418 bahasa dan dialek. Enam belas tahun kemudian, *Ethnologue* (Grimes, 1988) – berdasarkan penelitian anggotanya dan juga kompilasi hasil penelitian berbagai pihak – menyimpulkan bahwa di Indonesia terdapat tidak kurang dari 672 bahasa. *Ethnologue* menyampaikan bahwa di Indonesia terdapat tujuh daerah utama, yaitu Irian Jaya (249 bahasa), Jawa dan Bali (15 bahasa), Kalimantan (77 bahasa), Maluku (134 bahasa), Nusa Tenggara (54 bahasa), Sulawesi (105 bahasa), dan Sumatra (38 bahasa). Dari semua pelacakan itu belum tercapai kesatuan pendapat. Sesungguhnya di Indonesia terdapat berapa bahasa daerah? Perbedaan pendapat yang muncul, mungkin disebabkan oleh perbedaan metode penelitian yang digunakan serta

dasar pemilihannya. Perbedaan pendapat itu dimungkinkan juga karena adanya sekelompok orang yang benar-benar melakukan penelitian lapangan dan ada pula sekelompok orang yang hanya menduga-duga. Walaupun demikian, informasi tersebut sudah dapat digunakan untuk memulai langkah awal persiapan *Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-bahasa Daerah di Seluruh Indonesia*.

Pada tahun-tahun berikutnya, semasa penjarangan dan pengelolaan data berlangsung, pemantauan dari berbagai sumber tetap dilakukan agar dapat mengikuti perkembangan pelacakan bahasa. *Summer Institute of Linguistics* (2006) dalam terbitan khusus *Languages of Indonesia* menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 742 bahasa dengan rincian sebagai berikut: Jawa dan Bali (20 bahasa), Kalimantan (83 bahasa), Maluku (132 bahasa), Nusa Tenggara (73 bahasa), Papua (271 bahasa), Sulawesi (114 bahasa), dan Sumatra (49 bahasa); lalu Lewis (2009) mengidentifikasi bahwa di Indonesia terdapat 726 bahasa dengan perincian sebagai berikut: Jawa dan Bali (21 bahasa), Kalimantan (74 bahasa), Maluku (132 bahasa), Nusa Tenggara (76 bahasa), Papua (276 bahasa), Sulawesi (114 bahasa), dan Sumatra (33 bahasa) (Lewis et al., 2015, Martí et al., 2005). Pada tahun 2018, terdapat pelacakan terakhir dari *Ethnologue* yang merevisi hasil pelacakan sebelumnya dengan menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 719 bahasa, sehingga pada tataran dunia, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Papua Nugini yang memiliki 851 bahasa.

Jika ditelisik lebih rinci dari informasi yang mutakhir, dari 719 bahasa yang terdapat di Indonesia, semuanya tergolong dalam rumpun Austronesia atau Non-Austronesia. Sebanyak 255 bahasa daerah dapat diklasifikasikan sebagai bahasa Non-Austronesia (Lewis et al., 2015). Dengan demikian, sekitar sepertiga bahasa di seluruh Indonesia termasuk rumpun Non-Austronesia yang dapat pula disebut sebagai rumpun bahasa Papua. Ke-255 bahasa tersebut pada umumnya tersebar di wilayah Indonesia bagian Timur yaitu di Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Namun, dari 719 bahasa tersebut, 14 bahasa daerah sudah punah. Berdasarkan hasil riset, bahasa-bahasa yang punah terdapat di Indonesia bagian timur, yaitu 10 bahasa di Maluku Tengah (*Hoti, Hukumina, Hulung, Serua, Te'un, Palumata, Loun, Moksela, Naka'ela, and Nila*); 2 bahasa di Maluku Utara (*Ternateño dan Ibu*); serta 2 bahasa di Papua (*Saponi dan Mapia*). Keempat belas bahasa itu merupakan bahasa lisan yang tidak memiliki sistem tulisan sehingga tidak ada catatan apa pun mengenai penutur, bahasa, kearifan lokal, maupun budayanya.

Dengan demikian, di Indonesia sudah terdapat 14 bahasa yang punah, sehingga tinggal 705 bahasa yang hidup. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dari 705 bahasa tersebut, terdapat 341 bahasa daerah yang memerlukan perhatian khusus, yakni 266 bahasa berstatus *lemah* dan 75 bahasa berstatus *sekarat*. Mungkin kondisi kebahasaan yang buruk ini belum sepenuhnya disadari oleh kita semua. Sehubungan dengan hal itu, perlu direnungkan kembali betapa minimnya pengetahuan kita mengenai kekayaan budaya nasional sehingga tak mengherankan jika kurang menyadari kerapuhan eksistensi warisan budaya kita.

Pada umumnya, bahasa-bahasa yang berstatus *lemah* dan *sekarat* cenderung minim jumlah penuturnya dan tidak memiliki sistem tulisan. Kelangsungan hidup bahasa-bahasa itu sangat bergantung pada transmisi lisan antargenerasi. Apabila bahasa-bahasa itu tidak segera dibantu, akan sangat sulit untuk mempertahankan eksistensi budaya mereka. Crystal (2000: 20) berpendapat bahwa bahasa yang berpenutur sekurang-kurangnya 1.000 orang dapat dikategorikan sebagai bahasa yang masih memiliki daya hidup (*viable but small*) dan masih mungkin untuk direvitalisasi.

### 1.3 Kerangka Penelitian dalam Pemetaan Bahasa

Berdasarkan gambaran mengenai situasi kebahasaan tersebut, tersirat bahwa pelacakan bahasa-bahasa daerah memerlukan metode penelitian lapangan serta kriteria yang sama untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Upaya pelacakan yang terpadu ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat.

Drs. Lukman Ali (almarhum), selaku Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa periode 1989–1991, merupakan sosok yang menganggap bahwa pemetaan bahasa daerah di seluruh Indonesia perlu segera dilaksanakan. Gagasan itu kemudian berkembang menjadi rencana *Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-bahasa Daerah di Seluruh Indonesia* yang dilakukan secara terpadu antara linguistik historis komparatif dan dialektologi. Perkembangan gagasan itu, bertumpu pada pemikiran bahwa pada awalnya, dialektologi adalah “anak” dari linguistik historis komparatif, dengan demikian penjarangan data dapat dilakukan hanya satu kali pada tiap desa, namun data itu dapat dianalisis dua kali secara serentak dari sudut pandang dialektologi dan linguistik historis komparatif. Kedekatan yang tak terelakkan itu, dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran mengenai kekerabatan bahasa dan pemetaan bahasa yang terpadu. Gagasan ini unik karena tidak ada negara lain di dunia yang memadukan antara linguistik historis komparatif dengan dialektologi. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk proposal penelitian yang digarap di Wisma Syantikara, Yogyakarta pada tahun 1990 oleh semua doktor dan profesor dalam bidang linguistik historis komparatif dan dialektologi di Indonesia. Kemudian, sepanjang tahun 1991, Prof. Dr. Gorys Keraf (almarhum) selaku Ketua Tim Penelitian secara ketat mengawal persiapan itu, agar para pakar linguistik historis komparatif dan dialektologi mengoperasionalkan ide *Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-bahasa Daerah di Seluruh Indonesia*. Persiapan tersebut harus segera dilakukan secara simultan untuk membuat kuesioner baku, menentukan kriteria informan dan titik pengamatan, menentukan landasan teori dan teknik analisis, menyiapkan materi pelatihan untuk para penjarang data, melakukan koordinasi dengan universitas dan pemerintah daerah setempat, serta menyiapkan proposal anggaran untuk 1992.

Kuesioner baku dirancang terdiri atas 200 kosakata dasar Swadesh untuk menelusuri kekerabatan bahasa dan usia bahasa, 889 kosakata budaya terdiri atas berbagai medan makna untuk menelusuri distribusi variasi bahasa yang tervisualisasi dalam peta bahasa, serta 302 frasa dan kalimat sederhana untuk menelisik konstruksi sintaksis bahasa daerah. Rincian Kuesioner Baku, total terdiri atas 1191 pertanyaan sebagai berikut: Kosakata Dasar Swadesh (200 glos); Kosakata budaya dasar yang terdiri atas medan makna bagian tubuh (52 glos), Kata Ganti Sapaan dan Acuan (11 glos); Sistem Kekerabatan (25 glos); Kehidupan Desa dan Masyarakat (36 glos); Rumah dan Bagian-bagiannya (48 glos); Peralatan dan Perlengkapan (71 glos); Makanan dan Minuman (52 glos); Tanah, Halaman, dan Pepohonan (68 glos); Binatang (90 glos); Musim, Keadaan Alam, dan Arah (81 glos); Penyakit dan Pengobatan (36 glos); Kata Sifat & Warna (87 glos); Mata Pencaharian (20 glos); Pakaian & Perhiasan (29 glos); Permainan (8 glos); Gerak dan Kerja (98 glos); Bilangan (52 glos); Kata Tugas (25 glos); Frasa Nominal Relasi Posesif (10 glos); Frasa Nominal Relasi Positif (5 frasa); Frasa Nominal Relasi Asal (9 frasa); Frasa Verbal (8 frasa); Frasa Adjektival (10 frasa); Frasa Adverbial (19 frasa); Kalimat Sederhana (41 kalimat); dan terakhir termasuk merekam sejarah desa dan juga merekam sebuah folklore dalam bahasa yang digunakan di desa yang diteliti. Satu buku kuesioner dirancang untuk satu desa, jawaban informan langsung dituliskan ke dalam kuesioner dengan menggunakan aksara fonetik (Tim Peneliti, 1991).

Pada awalnya, para penjarang data yang dipilih adalah para guru bahasa di wilayah pengamatan yang berlatar pendidikan sarjana bahasa. Guru-guru bahasa tersebut memiliki pengetahuan dasar linguistik serta merupakan sosok yang mengenal wilayahnya dengan baik. Namun, mereka perlu diberi wawasan mengenai konsep dasar dan tujuan penelitian

kekerabatan dan pemetaan bahasa. Sehubungan dengan hal itu, mereka diberi pelatihan khusus mengenai tatacara wawancara dan cara menggunakan kuesioner di lapangan serta menuliskan data dengan aksara fonetik. Materi pelatihan disiapkan oleh Tim Peneliti (1991). Pelatihan di bidang linguistik historis komparatif dipimpin oleh Prof. Dr. Gorys Keraf (almarhum) dan di bidang dialektologi dipimpin Prof. Dr. Ayatrohaedi (almarhum). Pelatihan penjarangan data untuk para guru dimulai pada tahun 1992 di Kupang dan Dili; 1993 di Pineleng dan Ujungpandang; 1994 di Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak; 1995 di Padang dan Pekanbaru; 1996 di Medan, Palembang, dan Kendari; 1997 di Yogyakarta, Denpasar, dan Ambon; dan terakhir 2006 di Jayapura. Selanjutnya, mulai 2007 penjarangan data dilakukan adalah para staf Pusat Bahasa, Balai Bahasa, serta Kantor Bahasa dan apabila diperlukan masih dapat mengikutsertakan peneliti dari pihak universitas dan guru setempat.

Sumber utama pemberi data yang diharapkan adalah sosok informan dengan kriteria: 1) penduduk asli setempat agar mendapatkan informasi yang tepat mengenai bahasa mereka, dengan demikian harus dipastikan juga bahwa orang tua serta kakek-nenek si informan merupakan penduduk asli setempat; 2) berjenis kelamin pria maupun wanita, apabila informan tersebut sudah menikah, maka harus dipastikan bahwa istri atau suaminya juga orang asli setempat bukan pendatang; 3) berusia ideal berkisar sekitar 40 tahun, yaitu usia seseorang yang dianggap sudah menguasai bahasanya dengan baik; 4) memiliki alat dengar dan alat ucap yang sempurna, agar mendengar tanya dari penjarang data dengan baik dan informan dapat melafalkan bunyi-bunyi bahasanya dengan tepat; 5) berpendidikan hendaknya maksimum setara dengan sekolah dasar, maksudnya agar mereka belum terlalu banyak terpajan pada bahasa Indonesia; 6) memiliki pekerjaan yang bersifat menetap seperti petani, sehingga diharapkan si informan jarang bepergian keluar dari desanya agar mereka belum terlalu banyak terpengaruh bahasa atau dialek dari desa lain; 7) bersedia diwawancarai untuk menjawab 1191 tanya yang tidak menyita pekerjaannya; serta 8) memiliki sifat yang ramah serta tidak pemalu agar wawancara dapat berjalan lancar (Tim Peneliti, 1991).

Untuk menghindari data yang bersifat idiolek, yaitu cara pelafalan yang khas dari individu tertentu, jumlah informan di lapangan minimal harus berjumlah tiga orang. Satu orang merupakan informan utama dan dua orang lagi sebagai informan pendamping. Namun, kenyataan di lapangan biasanya saat melakukan wawancara di desa tertentu, penjarang data akan dikelilingi oleh sejumlah penduduk setempat sekitar 10 hingga 20 orang. Hal ini justru sangat menguntungkan karena jawaban serta pelafalan informan utama selalu diverifikasi oleh mereka semua, yaitu diiyakan atau dibantah. Penjarang data diharapkan mencatat data yang disepakati oleh mereka semua sehingga data yang dijarah memang merupakan kekhasan setempat.

Desa sebagai lokasi penelitian disebut sebagai titik pengamatan, karena pada saat dipetakan desa itu direpresentasikan sebagai sebuah titik dalam peta bahasa dari sebuah wilayah pengamatan. Sebelum menentukan berapa desa yang akan dijadikan titik pengamatan, sebagai langkah awal, perlu mempertimbangkan kondisi kebahasaan wilayah pengamatan dari berbagai sumber serta menyerap informasi dari guru serta pamong praja setempat. Jumlah desa yang diteliti tidak dapat diseragamkan, tergantung pada luas wilayah pengamatan dan kondisi kebahasaannya. Wilayah yang heterogen tentunya memerlukan titik pengamatan jauh lebih banyak dibandingkan dengan wilayah yang homogen. Selain itu, jarak antartitik pengamatan dapat bervariasi, misalnya berjarak sekitar 20 km apabila berada di wilayah pengamatan yang homogen, tetapi jarak antartitik pengamatan dapat kurang dari 20 km apabila berada di wilayah pengamatan yang heterogen. Sehubungan dengan hal itu, sedapat mungkin pemilihan desa didasarkan kepada tiga sifat desa, yaitu 1) desa yang tua, sebagai titik pengamatan yang sejak dahulu

merupakan lokasi pemakaian variasi bahasa tertentu; 2) desa yang sukar dihubungi, sebagai sebuah “daerah tertutup”, agar memperoleh data bentuk setempat; dan 3) desa yang mudah dihubungi, sebagai sebuah “daerah terbuka”, agar memperoleh data mengenai sentuh bahasa dan perubahan bahasa (lihat Ayatrohaedi, 1985 dan Lauder, 2007).

Penelitian kekerabatan serta pemetaan bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia merupakan langkah awal yang sangat bermanfaat untuk mengenal jati diri bangsa. Sehubungan dengan itu, pengetahuan dasar mengenai situasi kebahasaan dan variasinya secara menyeluruh sangat diperlukan. Dalam hal ini, informasi dari sebuah peta bahasa mengenai daerah pemakaian dan persebaran bahasa akan dapat menuntun seseorang untuk memahami situasi keanekaragaman bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara proporsional (Lauder, 2007).

## 1.4 Penjaringan Data

Kajian dialektologi dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga, waktu, sarana, dan dana khususnya mengimbangi kelangkaan sumber daya manusia yang berminat menangani keberagaman bahasa di seluruh Indonesia. Selain itu, dialektologi sebagai salah satu cabang linguistik yang berpijak pada ruang lingkup kajian variasi bahasa secara spasial (*language and space*), secara tak langsung bersentuhan dengan permasalahan bahasa yang terancam punah (*endangered languages*), kematian bahasa (*language death*), hak berbahasa-ibu (*linguistic human rights*), pemusnahan bahasa (*linguistic genocide*), dan ekologi bahasa (*ecolinguistics*). Persentuhan itu justru menguntungkan karena data yang tertera pada peta bahasa dapat membantu menyediakan informasi dasar bagi permasalahan tersebut sehingga masalah kerumitan bahasa di Indonesia dapat ditangani dengan baik.

Kuesioner baku yang dirancang untuk tataran nasional telah diujicobakan di beberapa daerah pada pertengahan 1991. Hasil uji coba tersebut dimanfaatkan untuk merevisi dan menyempurnakan kuesioner baku. Dengan demikian, pelaksanaan *Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-bahasa Daerah di Seluruh Indonesia* mulai dilaksanakan pada tahun 1992 di wilayah pengamatan Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur. Penjaringan data di lapangan dilaksanakan secara terpadu guna merekam distribusi dan keanekaragaman variasi bahasa daerah serta kekerabatan di antara bahasa daerah. Selain itu, dan pada saat yang sama, peta bahasa dapat memberi informasi mengenai proses kontak bahasa khususnya dalam hal pinjam-meminjam kosakata di antara sesama bahasa daerah dan juga masuknya kosakata bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah. Penjaringan datanya adalah sebagai berikut: Tahun 1992: Provinsi Timor Timur (50 peneliti; 171 desa) dan Nusa Tenggara Timur (20 peneliti; 60 desa); Tahun 1993: Provinsi Sulawesi Utara (28 peneliti; 88 desa), Sulawesi Tengah (29 peneliti; 99 desa), dan Sulawesi Selatan (42 peneliti; 132 desa); Tahun 1994: Provinsi Kalimantan Timur (30 peneliti; 120 desa), Kalimantan Tengah (23 peneliti; 69 desa), Kalimantan Selatan (10 peneliti; 30 desa), dan Kalimantan Barat (22 peneliti; 75 desa); Tahun 1995, Provinsi Sumatera Barat (15 peneliti; 48 desa), Bengkulu (15 peneliti; 45 desa), Riau (32 peneliti; 96 desa), dan Jambi (19 peneliti; 63 desa); Tahun 1996, Provinsi Aceh (25 peneliti; 76 desa), Sumatera Utara (23 peneliti; 79 desa), Sumatera Selatan (25 peneliti; 85 desa), Lampung (10 peneliti; 31 desa), dan Sulawesi Tenggara (15 peneliti; 60 desa); dan pada Tahun 1997: Provinsi Jawa Barat (12 peneliti; 48 desa), DKI Jakarta-Jabotabek (3 peneliti; 12 desa), Jawa Tengah (12 peneliti; 40 desa), DI Yogyakarta (2 peneliti; 8 desa), Jawa Timur (15 peneliti; 56 desa), Bali (5 peneliti; 16 desa), dan Nusa Tenggara Barat (18 peneliti; 63 desa).

Pada tahun 1997, Indonesia mulai dilanda krisis moneter. Kegiatan penjaringan data terpaksa dihentikan untuk sementara. Ternyata memerlukan waktu delapan tahun yaitu 1998–2005 untuk dapat melanjutkan proses penjaringan data. Ketika pada tahun 2006 kondisi ekonomi sudah memungkinkan untuk melakukan kegiatan penjaringan data lagi,

penjaringan data segera dilanjutkan ke Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, bahkan dapat melakukan penjaringan data tambahan untuk wilayah NTT. Kegiatannya sebagai berikut, Tahun 2006: Provinsi Papua (12 Peneliti, 41 desa) dan Papua Barat (19 peneliti, 29 desa); Tahun 2007: Provinsi Papua (12 Peneliti, 41 desa), Papua Barat (16 peneliti, 71 desa), Maluku (20 peneliti, 87 desa), dan Maluku Utara (8 peneliti, 29 desa); Tahun 2008: Provinsi Papua (14 Peneliti, 24 desa) dan Papua Barat (6 peneliti, 17 desa); Tahun 2009: Provinsi Papua (14 Peneliti, 25 desa), Papua Barat (6 peneliti, 15 desa), dan NTT (6 peneliti, 13 desa); Tahun 2010: Provinsi Papua (10 Peneliti, 25 desa) dan NTT (6 peneliti, 13 desa). Tahun 2011 – 2019: Provinsi Maluku (, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT, dan Kalimantan Utara.

## 1.5 Pengelolaan Data

Sementara para penjaring data bekerja di lapangan, secara simultan Tim Komputerisasi Data merancang pangkalan data (*database*) agar dapat mengelola semua data dari seluruh Indonesia yang dijaring di lapangan. Selain itu, yang sulit pada tahun 1990-an adalah belum tersedianya *International Phonetic Alphabet (IPA) symbols* untuk aplikasi komputer. Dengan demikian, Tim Komputerisasi Data terpaksa membuat program untuk penulisan setiap aksara fonetik agar dapat dientri ke pangkalan data dengan menggunakan *keyboard*.

Pengentrian data lapangan ke dalam komputer baru dapat dilaksanakan sekitar tahun 1994. Hal ini terjadi, karena Tim Komputerisasi Data memerlukan waktu untuk berulang kali menyempurnakan sistem pangkalan datanya serta program penulisan aksara fonetik. Selain itu, para pengentri data juga perlu diberi pelatihan terlebih dahulu cara membuat kode bagi tiap titik pengamatan secara cermat agar datanya tidak tertukar serta diberi pelatihan cara pengetikan aksara fonetik agar data yang dijaring di lapangan identik dengan data yang dientri ke dalam komputer. Dengan demikian, proses penjaringan data serta pengentrian data berlanjut secara terus-menerus dari satu wilayah pengamatan ke wilayah pengamatan berikutnya yaitu dari satu provinsi ke provinsi lainnya.

Langkah berikutnya, hasil pengentrian data itu dicetak per titik pengamatan untuk diverifikasi oleh para pakar. Proses ini berlangsung bolak-balik sampai data yang dijaring di lapangan identik dengan data yang dientri ke dalam komputer. Tim Pengelola Data menata semua buku kuesioner per titik pengamatan itu per tahun per provinsi dalam lemari khusus. Untuk setiap tahunnya buku kuesioner dicetak dengan warna sampul yang berbeda (*colour coded*) agar memudahkan penataan. Selain itu, Tim Pengelola Data juga harus menyimpan data dari setiap penjaring data di tiap titik pengamatan, termasuk informasi non-linguistik mengenai setiap titik pengamatan.

## 1.6 Pengolahan Data

Pengolahan data baru dapat dimulai setelah data dari lapangan dientri ke dalam pangkalan data. Data yang diolah adalah data yang telah diverifikasi serta dikoreksi. Pengolahan data dilakukan per wilayah pengamatan yaitu per provinsi. Teknik untuk menelisik dilakukan secara terpisah untuk kekerabatan bahasa dan pemetaan bahasa.

Penelidikan linguistik historis kompartif diawali dengan melakukan penelusuran korespondensi bunyi untuk melihat sejauh mana perangkat bunyi dalam kata-kata berkerabat itu dipantulkan oleh satu protobahasa (Crowley, 1992) dan bunyi-bunyi yang berkorespondensi, umumnya muncul secara teratur pada posisi yang sama dalam kosakata yang mirip, baik dari segi bentuk maupun makna. Selanjutnya, semua data dipilah berdasarkan konsep kognat. Leksikostatistik digunakan agar dapat melakukan rekonstruksi dan pengelompokan bahasa serta melakukan hipotesis mengenai kekerabatan bahasa. Hasil

penghitungan leksikostatistik menekankan pada derajat **kesamaan** atau kemiripan dengan kategori pemilahan sebagai berikut (Rea, 1990):

81% – 100%	Bahasa ( <i>language</i> )
37% – 80%	Keluarga ( <i>family</i> )
12% – 36%	Rumpun ( <i>stock</i> )
4% – 11%	Mikrofilum
1% – 3%	Mesofilum
≤ 1%	Makrofilum

Selanjutnya, penelidikan dialektologi diawali dengan melakukan pemilahan data berdasarkan konsep etimon. Setelah itu, seharusnya disiapkan peta dasar per provinsi agar semua data dapat dipetakan untuk memvisualkan distribusi variasi bahasa secara spasial. Setiap kata dibuatkan satu peta bahasa. Lalu berdasarkan kemunculan etimon diterakan garis imajiner berupa isoglos dan/atau isofon. Selanjutnya dibuat berkas isoglos dan/atau isofon untuk mendapatkan informasi di mana letak batas bahasa atau dialek di wilayah pengamatan tersebut. Selain itu, juga melakukan pengecekan lebih lanjut dengan dialektometri. Penghitungan dialektometri menekankan pada derajat perbedaan dengan kategori pemilahan sebagai berikut (Guiter, 1973):

Data Fonetis	Data Leksikon	Kategori
> 17%	81% – 100%	beda bahasa
12% – 16%	51% – 80%	beda dialek
8% – 11%	31% – 50%	beda subdialek
4% – 7%	21% – 30%	beda wicara
< 3%	< 20%	tidak ada perbedaan

Di akhir masa *Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-bahasa Daerah di Seluruh Indonesia*, mengingat kompleksitas kondisi kebahasaan di Indonesia, hasil pengolahan data yang ditampilkan terfokus pada pemetaan bahasa. Secara dialektologis, wilayah pengamatan atau provinsi digabung berdasarkan delapan wilayah pemaparan, yaitu 1) Sumatra; 2) Jawa dan Bali; 3) Kalimantan; 4) Sulawesi; 5) Nusa Tenggara Barat; 6) Nusa Tenggara Timur; 7) Maluku; dan 8) Papua. Sebagaimana dapat dilihat pada Bab II mengenai hasil pengolahan data terkini pada tahun 2019.

## 1.7 Hasil Terkini

Hasil pemetaan bahasa yang dituangkan dalam *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia* Edisi, baik dalam bentuk buku maupun peta bahasa daring, menggunakan kuesioner baku yang sama untuk semua data yang dikumpulkan dari semua titik pengamatan di seluruh Indonesia yang terpilih sebagai sampel penelitian. Data yang terhimpun berasal dari 2.560 titik pengamatan, belum mencapai 7.000 titik pengamatan sebagaimana yang direncanakan semula, sehingga ada kemungkinan masih terdapat satu dua bahasa yang luput atau belum teridentifikasi. Kemungkinan bahasa terpencil, bahasa suku terasing, serta bahasa imigran belum terekam secara komprehensif.

Berdasarkan kuesioner baku terdapat 1.191 pertanyaan, tetapi data yang dianalisis baru bertumpu pada 400 pertanyaan yang berupa kosakata dasar sebanyak 200 glos serta kosakata budaya dasar sebanyak 200 glos yang mencakup medan makna: 1) bagian tubuh 52 glos; 2) sistem kekerabatan 25 glos; 3) gerak dan kerja 98 glos; dan 4) kata tugas 25 glos. Sebagai langkah awal, analisis diutamakan pada tataran fonologi dan leksikon, bukan pada tataran frasa dan kalimat. Hal ini dilaksanakan karena secara linguistis, hampir semua bahasa di dunia cenderung berbeda pada tataran fonologi dan leksikon. Sehingga, sangat jarang

ditemukan perbedaan di tataran semantik, mengingat prinsip dasar pengelompokan data berdasarkan kognat maupun etimon adalah kemiripan bentuk dan makna. Selanjutnya, analisis pada tataran struktur gramatika akan dilaksanakan kemudian untuk penguatan identifikasi bahasa-bahasa kelompok Austronesia dan Non-Austronesia.

Peta Bahasa yang disajikan ini murni berdasarkan hasil penghitungan dialektometri. Dengan demikian, peta-peta bahasa yang terdapat pada Bab II tersebut belum dipadukan informasi wilayah penggunaan bahasanya berdasarkan berkas isoglos dan isofon. Analisis linguistik historis komparatif akan dilaksanakan setelah pemetaan bahasa selesai, karena peta bahasa justru mempermudah rekonstruksi bahasa proto dari bahasa-bahasa di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini pengelompokan bahasa-bahasa nusantara perlu dianalisis lebih mendalam karena kemiripan kata-kata kerabat di antara bahasa-bahasa itu berkisar antara 30--40% yang berarti agak sukar untuk menentukan bahasa mana lebih dekat ke bahasa lain (Keraf, 1984). Peta bahasa dapat membantu menemukan pola-pola pengelompokan secara terperinci dan terpercaya. Dengan sendirinya teori migrasi bahasa Dyen (1965) dan rekonstruksi teknisnya Blust (1985), kelak dapat dievaluasi kembali dan minimal ada kemungkinan dapat mempertajam pokok-pokok pikiran tersebut. Dengan demikian, kekerabatan bahasa berdasarkan korespondensi bunyi dan penghitungan leksikostatistik akan dilaksanakan dan disampaikan pada tahap berikutnya.

Walaupun peta-peta bahasa yang dihasilkan ini hanya menggunakan sampel dari 2.515 desa di seluruh Indonesia, namun peta-peta bahasa tersebut sudah dapat memberikan informasi mengenai distribusi bahasa serta dapat memvisualkan migrasi penduduk di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, hasil pemetaan ini dapat dijadikan informasi dasar untuk melakukan penelusuran tanah asal bahasa (*language homeland*). Kegiatan *Pemetaan Bahasa di Seluruh Indonesia* merupakan kegiatan yang memerlukan ketekunan. Pengolahan data secara serempak baru dimulai pada tahun 2007 setelah berakhirnya masa krisis moneter. Pengolahan tersebut dilaporkan dalam bentuk buku *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia*, Edisi Pertama di tahun 2008.

Adanya rentang waktu yang cukup panjang antara penjarangan data dan pengolahan data, memang memungkinkan adanya perubahan bahasa dan juga perubahan wilayah administrasi karena adanya pemekaran wilayah. Sebagai catatan, data untuk wilayah pengamatan 1) Provinsi Gorontalo terdokumentasi di Provinsi Sulawesi Utara; 2) Provinsi Sulawesi Barat terdokumentasi di Provinsi Sulawesi Selatan; 3) Provinsi Kepulauan Riau terdokumentasi di Provinsi Riau; 4) Provinsi Bangka Belitung terdokumentasi di Provinsi Sumatra Selatan; 5) Provinsi Banten terdokumentasi di Provinsi Jawa Barat; dan 6) data wilayah pengamatan Provinsi Maluku Utara terdokumentasi di Provinsi Maluku. Selain itu, informasi mengenai nama desa, kecamatan (distrik), kabupaten, dan provinsi untuk edisi keenam ini sudah disesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Permendagri tersebut sangat membantu untuk menentukan titik koordinat dari desa-desa yang disampaikan dalam narasi di Bab II karena informasi analisis berdasarkan berkas isoglos dan isofon belum dipadukan dalam pembuatan peta bahasa.

Tim Visualisasi Peta Bahasa adalah para staf Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim dari Badan Informasi Geospasial. Mereka memanfaatkan sistem interpolasi untuk menghasilkan poligon yang dibangun dari titik tengah koordinat desa. Selanjutnya, pemetaan yang disampaikan pada peta bahasa ini menggunakan sistem petak warna. Perlu dipahami bahwa untuk sistem petak warna, bahasa yang berbeda harus divisualkan dengan warna yang berbeda, sedangkan penggunaan warna yang mirip secara dialektologis dianggap sebagai dialek dari suatu bahasa. Mengingat jumlah bahasa yang berhasil diidentifikasi berjumlah 718, untuk memvisualkan hal itu diperlukan 718 warna yang berbeda. Pengolahan warna secara digital sudah memberi ciri pemerlain untuk ke-718

bahasa yang berbeda berdasarkan komposisi warna numerik. Apabila pada sebuah peta bahasa terdapat warna yang tampaknya mirip padahal mengacu ke bahasa yang berbeda, sesungguhnya hal itu lebih terkait pada kemampuan persepsi mata manusia yang tidak mampu membedakan ratusan warna sekaligus.

Di dalam peta bahasa ini, penamaan untuk bahasa atau dialek pada umumnya mengikuti nama yang sudah dikenal secara umum dan/atau nama yang tertera dalam kepustakaan. Lazim juga apabila nama sebuah bahasa menggunakan nama suku atau nama lokasi di mana bahasa itu dituturkan. Namun, ada juga kasus manakala penutur di desa itu memberikan nama lain. Hal ini mungkin saja terjadi, apabila dikaitkan dengan masalah jati diri, sejarah pemukiman, atau bahkan toponim setempat. Selain itu, untuk penamaan bahasa yang dianggap sebagai dua bahasa, tetapi dalam penghitungan dialektometri terkategori sebagai dua dialek dari satu bahasa yang sama, namanya akan digabung. Termasuk juga kasus persebaran bahasa di luar tanah asalnya yang menampilkan ciri khas sesuai lokasinya sekarang. Untuk menangani hal itu, penulisan nama bahasa dapat ditulis dengan cara menempatkan nama lain dalam tanda kurung atau diberi tanda hubung.

Rincian narasi persebaran bahasa di 34 Provinsi di Indonesia disusun berdasarkan urutan tempat secara geografis dan narasi bahasa tersebut dapat dikelompokkan ke dalam delapan wilayah, yaitu 1) Sumatra; 2) Jawa dan Bali; 3) Kalimantan; 4) Sulawesi; 5) Nusa Tenggara Barat; 6) Nusa Tenggara Timur; 7) Maluku; dan 8) Papua. Secara keseluruhan di tahun 2019 ini, terjaring data dari 2.560 titik pengamatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada setiap wilayah pemaparan diidentifikasi jumlah bahasanya. Namun untuk menghitung jumlah bahasa di seluruh Indonesia bukanlah penjumlahan bahasa dari tiap provinsi sebagai wilayah pengamatan karena di suatu provinsi dimungkinkan adanya bahasa yang sama dengan provinsi lainnya. Identifikasi persebaran bahasa di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: Aceh (7 bahasa); Sumatra Utara (5 bahasa); Sumatra Barat (3 bahasa); Riau (5 bahasa); Jambi (7 bahasa); Sumatra Selatan (7 bahasa); Bengkulu (6 bahasa); Kepulauan Bangka Belitung (2 bahasa); Kepulauan Riau (3 bahasa); Lampung (6 bahasa); Banten (4 bahasa); DKI Jakarta (4 bahasa); Jawa Barat (3 bahasa); Jawa Tengah (2 bahasa); DI Yogyakarta (1 bahasa); Jawa Timur (3 bahasa); Bali (5 bahasa); Kalimantan Barat (9 bahasa); Kalimantan Tengah (23 bahasa); Kalimantan Selatan (10 bahasa); Kalimantan Timur (16 bahasa); Kalimantan Utara (11 bahasa); Sulawesi Utara (10 bahasa); Sulawesi Tengah (21 bahasa); Sulawesi Selatan (14 bahasa); Sulawesi Tenggara (14 bahasa); Gorontalo (3 bahasa); Sulawesi Barat (9 bahasa); Nusa Tenggara Barat (72 bahasa); Nusa Tenggara Timur (68 bahasa); Maluku (62 bahasa); Maluku Utara (19 bahasa); Papua (325 bahasa); Papua Barat (103 bahasa). Secara terperinci, narasi mengenai bahasa-bahasa di Indonesia di tiap wilayah pemaparan disajikan dalam Bab II.

## 1.8 Visualisasi Peta

Visualisasi Peta Bahasa adalah para staf Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim dari Badan Informasi Geospasial. Mereka memanfaatkan metode Poligon Thiessen dengan cara membentuk garis antarbahasa, berdasarkan hasil perhitungan dialektometri untuk menghasilkan proporsi area penutur yang lebih akurat. Titik bahasa di suatu wilayah administrasi atau daerah pengamatan dianggap dapat mewakili lokasi suatu bahasa sehingga koordinat tengahnya diambil sebagai titik berat. Titik berat tersebut dihubungkan satu sama lain dan dibagi sama besar untuk mendapatkan area tiap bahasa. Selanjutnya, pemetaan yang disampaikan pada peta bahasa Edisi Keenam ini menggunakan sistem petak warna. Perlu dipahami bahwa untuk sistem petak warna, bahasa yang berbeda harus divisualkan dengan warna yang berbeda. Penyajian visualisasi peta dilakukan dengan menampilkan spektrum warna yang berbeda untuk setiap bahasanya, mengingat penggunaan warna yang mirip, misalnya warna merah

tua dan merah muda, secara dialektologis dianggap sebagai dialek dari suatu bahasa. Jumlah bahasa yang sangat banyak, yaitu 718 bahasa, tidaklah sebanding dengan jumlah warna yang dapat dikenali oleh mata. Oleh karena itu, pemilihan spektrum warna dalam pembuatan peta bahasa ini dilakukan secara otomatis oleh mesin. Apabila pada sebuah peta bahasa terdapat warna yang tampak mirip padahal mengacu ke bahasa yang berbeda, hal ini berkaitan dengan kemampuan persepsi mata manusia yang tidak mampu membedakan ratusan warna sekaligus.

## 1.9 Penutup

Bahasa daerah adalah “jembatan” untuk memahami ekspresi nilai, norma, aturan, adat kebiasaan, dan kearifan lokal yang memelihara budaya dan lingkungan hidup. Dengan demikian, informasi dari *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia* ini, antara lain bermanfaat untuk 1) menginventarisasi jumlah bahasa di Indonesia yang diperoleh dari hasil penjarangan data di lapangan; 2) membantu masyarakat untuk makin memahami kekayaan budaya bangsa, 3) membantu penetapan pendidikan bahasa melalui muatan lokal agar dapat dirancang secara tepat; dan 4) mendeteksi migrasi dan distribusi penduduk.

Pemetaan bahasa ini merupakan langkah awal untuk memotret distribusi variasi bahasa secara nasional. Masih panjang perjalanan untuk menggali lebih mendalam mengenai keunikan bahasa dan budaya di setiap titik pengamatan. Agar penelitian pemetaan bahasa ini dapat memberi informasi yang komprehensif mengenai situasi kebahasaan di Indonesia, maka kekerabatan bahasa, sensus kebahasaan, dan penelitian vitalitas bahasa perlu segera dilakukan di tiap provinsi untuk memutakhir data jumlah penutur dan informasi status tiap bahasa agar dapat ditindaklanjuti melalui konservasi dan/atau revitalisasi.

Sebagai catatan penutup, pemetaan bahasa berurusan langsung dengan variasi bahasa dan bersentuhan juga dengan permasalahan bahasa sekarat, kematian bahasa, hak berbahasa-ibu, pemusnahan bahasa, dan ekologi bahasa. Pokok pikiran yang memayungi semua permasalahan itu adalah penelisikan dan pengelolaan kekayaan budaya. Kegiatan pemetaan bahasa sebagai salah satu upaya pendokumentasian serta perlindungan yang komprehensif dapat membantu memperlambat laju kematian bahasa.

Bangsa kita merupakan bangsa yang multikultural dan multilingual dengan demikian semangat menghargai keanekaragaman bahasa dan budaya harus terus ditingkatkan. Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia dapat menindaklanjuti dengan cara membantu menggali potensi bahasa daerah, antara lain dengan membuatkan ortografi atau ejaan bagi bahasa daerah yang terancam punah dan juga membantu menghimpun kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan karena salah satu fungsi bahasa adalah menyimpan tata nilai budaya. Untuk mengenali budaya secara utuh perlu proses yang panjang. Secara nasional, penelitian pemetaan bahasa, walau memerlukan waktu yang lama, sangat perlu dilakukan demi memahami jati diri dan eksistensi diri secara utuh sebagai anak bangsa di bawah naungan NKRI. Bahasa memang menunjukkan bangsa. Besar harapan, perbedaan nuansa atau perbedaan pendapat yang muncul sebagai konsekuensi keragaman itu, dapat lebih dipahami dan dapat ditangani dengan lebih arif untuk menuju Indonesia baru yang lebih sejahtera.